



THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND FINANCIAL STATEMENT FRAUD: A LITERATURE REVIEW OF FRAUD TRIANGLE THEORY

Yudha Pramana¹, Anis W. Hermawan²

¹Faculty of Economics, Udayana University, Denpasar, Indonesia E-mail: yudhapramana97@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta. Indonesia. E-mail: aniswahyu524@gmail.com

Abstrak

Kecurangan yang terjadi pada industry konstruksi telah menciptakan efek domino terhadap perusahaan dan kesinambungannya serta terhadap negara. Berdasarkan kajian ringkas terhadap teori fraud triangle, disimpulkan bahwa masih terjadinya motive atau pressure, rationalization, and opportunity yang belum dapat ditangani secara komprehensif merupakan penyebab masih maraknya kecurangan dalam pelaporan keuangannya. Adapun inti dari kecurangan yang terjadi dalam industry konstruksi adalah penghasilan yang dilakukan melalui illegal act, sebagaimana modusnya dilakukan dalam bentuk kecurangan tagihan untuk unit kerja fiktif, vendor fiktif, perusahaan “pinjam bendera”, mengganti atau menurunkan kualitas bahan material, pengalihan biaya lump-sum ke biaya material, pemakaian pribadi atas peralatan/perlengkapan proyek, kolusi tender, dan pencucian uang. Strategi utama dalam menangani kecurangan tersebut adalah pemilihan eksekutif puncak yang berintegritas dan akuntabel, serta kesadaran dan partisipasi dari semua pegawai di semua lini perusahaan.

Keywords: construction, financial report, fraud

A. Latar Belakang

Pasar konstruksi global dunia yang ditaksir bernilai sekitar US\$3.200 miliar per tahun, ternyata memiliki reputasi dunia yang negatif terkait maraknya kecurangan melalui insiden korupsi, penyelewengan aset, dan penyuapan, sebagaimana estimasi The American Society of Civil Engineers menunjukkan bahwa jumlah korupsi industry konstruksi dunia telah mencapai kisaran US\$340 miliar per tahun (Sohail dan Cavill, 2008). Hal ini juga sejalan dengan terungkapnya banyak skandal terkait kecurangan pada industry konstruksi. Terungkapnya skandal-skandal perusahaan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan pelaporan keuangan pada periode-periode tertentu laporan keuangan. Padahal, laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.

Beberapa studi telah berusaha meneliti tentang kecurangan pada pelaporan keuangan. Martin (2011) menyimpulkan bahwa terjadinya kecurangan disebabkan kuatnya ketidaketisan para pihak yang terlibat yang dilakukan melalui deception, sebagaimana deception merupakan hal yang riil bagi individu, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam merespon insentif yang tidak terkontrol dan konflik kepentingan yang ada. Kemudian, studi Rezaee (2005) menyimpulkan bahwa kecurangan tidak

dapat terlepas dari kurangnya fungsi pengawasan, manajemen yang arogan dan serakah, perilaku bisnis yang tidak pantas yang dilakukan oleh eksekutif puncak, peraturan yang longgar, pengungkapan keuangan yang tidak memadai dan kurang transparan; dan kelalaian dewan komisaris serta pemegang saham. Selanjutnya, Lennox dan Pittman (2010) menyimpulkan bahwa peningkatan kecurangan keuangan hanyalah sebuah artefak ukuran perusahaan. Pengendalian dengan baik ukuran perusahaan dan faktor-faktor penentu lainnya, seperti umur perusahaan, persentase direktur independen, persentase komite audit independen, jumlah rapat komite audit menunjukkan bahwa insiden kecurangan pelaporan keuangan secara konsisten lebih rendah (Lennox dan Pittman, 2010).

Kecurangan yang terjadi pada perusahaan tidak dapat terlepas dari 3 faktor utama, sebagaimana Donald Cressey (Martin, 2011; Golden *et al.*, 2011; Wells, 2018; Cendrowski dan Martin, 2007) mengemukakannya sebagai *fraud triangle*, yang terdiri dari motive atau pressure, rationalization, and opportunity. Sehingga, studi ini perlu menjawab rumusan permasalahan yang ada, yakni yang mempertanyakan mengapa industri konstruksi rentan dengan kecurangan laporan keuangan.

B. Analisis dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Fraud Triangle Theory dan Industri Konstruksi

Kecurangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti; a) Manipulasi, falsifikasi, dan alterasi catatan-catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan, b) Misrepresentations atau omissions yang sengaja atas transaksi-transaksi dan informasi penting lainnya, c) Misapplication prinsip-prinsip akuntansi terhadap jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan yang disengaja. Fraud merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Fraud secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Pada intinya fraud dalam perusahaan merupakan perbuatan disengaja yang didasari ketidakjujuran bisa dilakukan oleh seseorang, baik karyawan maupun pimpinan yang berakibat merugikan pihak lain, baik secara financial maupun non-financial, yang dampaknya dapat merusak kualitas dan integritas proses pelaporan keuangan, membahayakan integritas dan objektivitas profesi auditor (termasuk eksternal auditor dan internal auditor perusahaan), menyebabkan turunnya kepercayaan pasar dan investor terkait dengan keandalan informasi keuangan, membuat pasar modal menjadi kurang dipercaya dan dianggap tidak efisien, membahayakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara, menimbulkan biaya litigasi yang besar, merusak reputasi individu yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan tersebut (seperti pengenaan sanksi terhadap top eksekutif perusahaan dan pencabutan ijin auditor tertentu), menyebabkan kebangkrutan maupun kerugian ekonomi yang substansial pada perusahaan, dan menyebabkan hancurnya operasional dan kinerja perusahaan (Rezaee dan Riley, 2010).

Salah satu sarana yang sering dipergunakan korporasi tertentu untuk melakukan kecurangan adalah laporan keuangan. Fraudulent financial reporting adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja

dengan maksud menipu para pemakai laporan. Penyimpangan dalam laporan keuangan ini akan menyesatkan bagi pemakai.

Masih terjadinya fraudulent financial reporting telah menjadi perhatian besar American Institute Certified Public Accountant (AICPA) dengan menerbitkan Statement on Auditing Standards No. 99 (SAS No. 99) mengenai Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit pada Oktober 2002 untuk memberikan solusi terhadap kelemahan dalam prosedur pendeteksian kecurangan di dunia (Skousen *et al.*, 2009). Kemudian, International Federation of Accountants (IFAC) menerbitkan International Standards on Auditing (ISA) yang memberi ilustrasi faktor kecurangan yang didasarkan pada teori segitiga kecurangan atau fraud triangle (Wahyuni dan Budiwitjaksono, 2017). Menurut Cressey, fraud triangle mendasari financial statement fraud, yang elemennya terdiri dari motif/tekanan/insentif, kesempatan, dan rasionalisasi.

Selanjutnya, Statement on Auditing Standards (SAS) Nomor 99 menguraikannya (Cendrowski dan Martin, 2007) masing-masing elemen fraud triangle tersebut. Motif melakukan laporan keuangan yang tidak benar mengacu pada adanya insentif atau tekanan ketika adanya upaya untuk memanipulasi hasil/kinerja demi untuk mendapatkan reward, sehingga perusahaan harus mewaspadaai program kompensasi yang berhubungan dengan reward yang sangat besar terhadap pencapaian target tertentu, yang justru dapat mendistorsi keuangan perusahaan itu sendiri. Kesempatan untuk mendistorsi laporan keuangan perlu diwaspadai dari upaya mencurangi asset-aset dengan memanipulasi system akuntansi dalam mencapai suatu target tertentu. Sedangkan sikap rasionalisasi berhubungan dengan sikap individu dalam perusahaan terhadap laporan keuangan yang akurat, yang menuntun mereka untuk memanipulasi laporan keuangan melalui beberapa teknik termasuk mempengaruhi management judgement, seperti melakukan perubahan estimasi atau cadangan tertentu, menunda pengakuan biaya, dan mempercepat pengakuan penghasilan.

Pemahaman tentang kecurangan diatas menunjukkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan dapat terjadi di sector industry, termasuk industry konstruksi. Hal ini didasarkan pada praktek industri konstruksi yang melibatkan beragam bahan, orang, dan peralatan dalam memenuhi persyaratan suatu proyek konstruksi fisik, terutama konstruksi besar yang tidak dapat terlepas dari hubungan kontraktual (Hermawan, 2022). Kompleksitas industry konstruksi menjangkau pada bidang hukum, pajak, manajemen, dan bisnis, sehubungan dengan beberapa hal utama yang merupakan siklus yang terdapat dalam industry konstruksi, seperti pendapatan jasa konstruksi tidak melebihi biayanya, terpenuhinya permintaan di jasa konstruksinya, terpenuhinya sumber daya keuangan dalam membiayai proyek sampai diterimanya termin pembayaran dari pelanggan, terpenuhinya tenaga kerja yang terampil, dan biaya overhead yang memenuhi proyeksi beban kerja (Schaufelberger, 2009).

Beberapa studi telah membahas tentang kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan di industry konstruksi. Sohail dan Cavill (2008) mengemukakan bahwa tantangannya telah menjangkau pada praktik penyuapan, penggelapan uang, dan penipuan, yang dapat terjadi pada setiap tahap proyek konstruksi, sehingga diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi. Kemudian, Sinaga and Hermawan (2021) menegaskan bahwa illegal act dalam sector konstruksi tersebut bermuara pada penghasilan yang tidak dilaporkan atau sengaja disamarkan. Selanjutnya, Sinaga, Pramana, dan Hermawan (2023) menegaskan bahwa *illegal act* dalam sector konstruksi

dapat terjadi dalam ragam bentuk, antara lain kecurangan tagihan untuk unit kerja fiktif, vendor fiktif, perusahaan “pinjam bendera”, mengganti atau menurunkan kualitas bahan material, pengalihan biaya lump-sum ke biaya material, pemakaian pribadi atas peralatan/perengkapan proyek, kolusi tender, dan pencucian uang, yang semuanya erat dengan upaya menyembunyikan/menghindari penghasilan.

b. Motif atau Tekanan atau Insentif dalam Kecurangan Industri Konstruksi

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Tekanan tidak dapat terlepas dari motif yang melegitimasi perbuatan suatu personal atau profesional untuk melakukan kecurangan (Wells, 2018) baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal ataupun insentif yang didapat akibat terjadinya kecurangan.

Motif merupakan gambaran akan hal yang memicu kebutuhan akan dana atau alasan yang memicu seseorang melakukan kecurangan, dapat merujuk pada adanya tekanan akibat kebutuhan uang yang peruntukannya untuk berbagai macam tujuan (Cendrowski dan Martin, 2007). Pada umumnya, motive utama terjadinya kecurangan selalu didominasi oleh ketamakan, sedangkan kemungkinan adanya motif lain disebabkan oleh keputusan dalam berinvestasi sehingga melalui upaya kecurangan seperti penyuapan untuk mendapatkan proyek tertentu dianggap dapat menutupi kerugian investasi yang terjadi (Martin, 2011). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bowen *et al.* (2012) di Afrika Selatan, dengan menyimpulkan bahwa hal-hal seperti pengaruh politik, nepotisme, persaingan yang tinggi, kontinuitas untuk selalu mendapatkan proyek, dan keinginan untuk bertahan secara ekonomi merupakan alasan yang selalu menekan para pelaku industry konstruksi untuk melakukan kecurangan.

Selanjutnya, insentif dan tekanan ataupun motif dapat berwujud dalam beberapa varietas sebagaimana Golden *et al.* (2011) menggambarkan bahwa bonus ataupun insentif yang representasinya memakan porsi yang sangat besar dalam memotivasi kinerja manajemen, ternyata dapat memicu ketamakan ataupun ketakutan kehilangan jabatan/posisi manajemen puncak yang akan melatarbelakangi aktivitas kecurangan.

Adanya motif atau tekanan atau insentif dalam industry konstruksi dapat dilihat dari persaingan untuk mendapatkan proyek yang sangat ketat. Apalagi proyek tersebut banyak didapat dari pemerintah yang notabene mempergunakan anggaran negara. Hal ini membuka kesempatan kolusi antara oknum dalam pemerintah yang berwenang untuk memutuskan proyek dengan oknum industry konstruksi yang menginginkan proyek tersebut. Tentunya, upaya tersebut akan menimbulkan insentif bagi kedua belah pihak, dimana biaya yang tercipta biasanya menghasilkan 2 (dua) bentuk kecurangan, yaitu biaya/insentif/kolusi yang menjadi pengurang kualitas konstruksi dan/atau biaya/insentif/kolusi yang akan menaikkan nilai proyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa motif atau tekanan atau insentif dalam industry konstruksi adalah penghasilan. Penghasilan dalam terminology Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dalam nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh suatu subjek penghasilan.

c. Kesempatan dalam Kecurangan Industri Konstruksi

Kesempatan merupakan metode yang dilakukan oleh suatu individu untuk melakukan kecurangan yang biasanya memanfaatkan kedudukan atau posisinya di perusahaan agar kecurangan yang dilakukan tersebut tidak terdeteksi (Wells, 2018). Selanjutnya Martin, (2011) memaknai opportunity sebagai suatu keadaan yang memungkinkan pelaku melakukan kecurangan, seperti minimnya pengawasan, supervisi, aturan, bahkan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan hasil studi Bowen *at al.* (2012) terhadap kecurangan yang dilakukan oleh industri konstruksi di Afrika Selatan dengan menyimpulkan bahwa mayoritas kesempatan untuk melakukan kecurangan pada industri konstruksi terjadi pada setiap kegiatan proses pengadaan suatu konstruksi bangunan, terutama pada tahapan dilakukannya tender dan tahapan pengevaluasian tender. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesempatan tersebut antara lain akibat adanya penyalahgunaan wewenang, adanya nepotisme, ketidakadaan mekanisme control, struktur kontrak atau pengadaan yang lemah, dan minimnya sanksi terhadap kecurangan. Sehingga, untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar pada BEI dituntut untuk selalu memiliki organ korporasi yang independent yang sekurang-kurangnya meliputi komite audit independent, komisaris independent, dan direktur independent.

Urgensi adanya jabatan/posisi penting di perusahaan yang terdaftar di bursa efek, seperti komite audit, komisaris, dan direktur yang independent dikemukakan oleh Brown (2015) dengan menyatakan bahwa "independen" sangat berperan dalam menunjukkan pandangan yang terpisah dan tidak memihak pada perusahaan karena komite audit, komisaris, dan direktur independent tidak setuju dengan semua yang dikatakan eksekutif perusahaan ketika melihat sesuatu yang mereka pikir salah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak setiap perusahaan, khususnya yang terdaftar di BEI, sangat membutuhkan orang-orang yang dapat secara kritis menganalisis ide-ide dan tindakan para eksekutif di perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan swasta kecil dan organisasi nirlaba di negara Amerika Serikat dan Inggris menunjuk direktur independen dalam jumlah yang semakin besar.

Adanya kesempatan dalam kecurangan pelaporan keuangan di industry korporasi tidak dapat terlepas dari integritas dan akuntabilitas para manajemen puncak di perusahaan. Manajemen puncak yang berintegritas dan akuntabel akan berusaha membuat control perusahaan yang ketat, termasuk memilih posisi-posisi di manajemen dibawahnya yang berintegritas dan akuntabel juga. Selain itu, manajemen yang berintegritas dan akuntabel akan menciptakan sistem rekrutmen, sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem manajemen yang akuntabel, sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik dan berkesinambungan.

d. Rasionalisasi dalam Kecurangan Industri Konstruksi

Rasionalisasi merupakan upaya pembenaran secara rasional tindakan kecurangan yang dilakukan dengan memandang apa yang mereka lakukan adalah hal biasa dan memandang bahwa mereka adalah orang jujur namun dalam suatu situasi yang salah (Wells, 2018). Elemen rasionalisasi menjelaskan mengapa kecurangan terjadi pada saat ada kelemahan pengawasan dan kebutuhan seseorang akan uang, yang permulaan perbuatan curang tersebut dilakukan secara kecil-kecilan dengan perjalanan waktu bila tidak ketahuan akan tumbuh pada kecurangan yang lebih besar (Cendrowski dan Martin, 2007). Beberapa pembenaran yang dirasionalkan pelaku kecurangan, antara lain, didasarkan pada perbuatan yang sudah umum dilakukan oleh

banyak orang, merupakan bagian dari upaya untuk menolong pihak-pihak tertentu, agar dapat menyumbang badan amal, kebutuhan untuk menutupi biaya hidup dan utang-utang pribadi (Martin, 2011), anggapan perusahaan yang memiliki aset yang sangat besar sehingga tidak masalah bila hanya mengambil uang perusahaan bila dalam jumlah kecil (Cendrowski dan Martin, 2007).

Adapun salah satu karakter yang menggambarkan rasionalisasi pada industri konstruksi terlihat dari firm size, sebagaimana Schiffer dan Weder (2001) mengkaji bahwa firm size sangat mempengaruhi suatu perusahaan dimana semakin kecil perusahaan maka semakin signifikan permasalahan yang timbul bila dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar, dan Sampul dan Christiawan (2017) yang berpendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka penyediaan informasi terhadap investor semakin lengkap sehingga semakin mempermudah investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Terdapat beberapa pemikiran yang berbeda dalam menentukan tolak ukur ukuran perusahaan. Schiffer dan Weder (2001) mendasarkan firm size pada jumlah karyawan tetap suatu perusahaan, dimana perusahaan yang jumlah karyawannya 5-50 merupakan perusahaan kecil, jumlah karyawannya 51-500 merupakan perusahaan sedang, dan perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 500 merupakan perusahaan besar. Sampul dan Christiawan (2017) berpendapat bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dari total asset perusahaan, total penjualan atau kapitalisasi pasar.

Adanya rasionalisasi menunjukkan bahwa manajemen puncak pada industry konstruksi harus memahami bahwa korporasi harus tetap sustainable. Sehingga, rasionalisasi dalam industry konstruksi dapat diminimalisir dengan tidak mentolerir kecurangan dalam nama dan bentuk apapun. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan sistem pengawasan pada masing-masing bagian yang rentan akan kecurangan di industry konstruksi, seperti bagian pengadaan barang/jasa dan bagian pengeluaran kas/bank. Selain itu, perlu melibatkan semua komponen dalam perusahaan agar menanamkan dan menerapkan kinerja yang tepat dan efisien, salah satunya adalah mengontrol agar setiap uang yang dibelanjakan selalu diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi dan penyedia secara professional, mandiri, dan bertanggung jawab (Effrianto, 2022).

C. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa industry konstruksi sangat rentan dengan kecurangan mengingat banyaknya peluang berupa motive atau pressure, rationalization, and opportunity yang belum dapat ditangani secara keseluruhan. Inti dari kecurangan tersebut adalah penghasilan yang dilakukan melalui illegal act, sebagaimana ragam bentuknya antara lain adalah kecurangan tagihan untuk unit kerja fiktif, vendor fiktif, perusahaan “pinjam bendera”, mengganti atau menurunkan kualitas bahan material, pengalihan biaya lump-sum ke biaya material, pemakaian pribadi atas peralatan/perengkapan proyek, kolusi tender, dan pencucian uang. Strategi yang terpenting untuk menanganinya adalah peningkatan integritas dan akuntabilitas eksekutif puncak serta kesadaran dan partisipasi dari semua pegawai di semua lini perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, P.A., Edwards, P.J., dan Cattell, K. (Oktober 2012) 'Corruption in the South African construction industry: a thematic analysis of verbatim comments from survey participants', *Construction Management and Economics*, Vol. 30, hal. 885-901.
- Brown, G. 2015. *The Independent Director*. Palgrave Macmillan, New York.
- Cendrowski, H., dan Martin, J. (2007) 'The Fraud Triangle', dalam Cendrowski, H., Martin, J.P. dan Petro, L.W. (ed.) *The Handbook of Fraud Deterrence*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Effrianto, Piping, 25 Modus Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, available at <https://emedia.dpr.go.id/wp-content/uploads/2022/08/25-MODUS-KECURANGAN-DALAM-PBDJ-EBOOK.pdf>, accessed on December 20, 2022.
- Golden, T.W., *et al.* 2011. *A Guide to Forensic Accounting Investigation*. John Wiley & Sons, New Jersey.
- Hermawan, Anis W., Improving Tax Compliance of the Construction Sector in Indonesia: A Juridical Perspective, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 6.
- Lennox, C., & Pittman, J.A. (2010) 'Big Five Audits and Accounting Fraud', *Contemporary Accounting Research*, 27(1), hal. 209-247.
- Martin, V. 2011. *Fraud Prevention for Commercial Real Estate Valuation*. Appraisal Institute, Chicago.
- Rezaee, Z. (2005) 'Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud', *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), hal. 277-298.
- Rezaee, Z., dan Riley, R. 2010. *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. John Wiley & Sons, New Jersey.
- Sampul, S.S. dan Christiawan, Y.J. (Agustus 2017) 'Analisa Hubungan Beban Pajak Penghasilan Tahun Sebelumnya terhadap Aktivitas Manajemen Laba Tahun Berjalang dengan Menggunakan Firm Size dan Leverage sebagai Variabel Kontrol pada Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan di Indonesia', *Business Accounting Review*, Vol. 5, No. 2, hal. 493-504.
- Schaufelberger, John, *Construction Business Management*, (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2009), hlm. 1.
- Schiffer, M. dan Weder, B. 2001. *Firm Size and the Business Environment: Worldwide Survey Results*. The World Bank and International Finance Cooperation, Washington, DC.
- Sinaga, H.D.P., and Hermawan, A.W. (2021), "Tax Reorientation as Corruption Prevention on Investment in Indonesia", *Journal of Accounting and Finance*, Vol. 5, No. 1, pp. 21-30.
- Sinaga, Henry Dianto Pardamean, Pramana, Yudha, dan Hermawan, Anis W., Income Tax Reconstruction on Construction Services to Support Development in Indonesia, *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol. 19, No. 1/2, 2023.
- Sohail, M., & Cavill, S. (2008) 'Accountability to prevent corruption in construction projects', *Journal of Construction Engineering & Management*, 134(9), 729-738.
- Wells, J.T. 2018. *International Fraud Handbook*. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.